

Kerjasama antara



Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia



Program Studi Ilmu Komunikasi

Volume 1
Nomor 1
Juni 2022

KONTEKSTUAL
Jurnal Ilmu Komunikasi
www.ubl.ac.id/kontekstual

Ruang Publik, Politik Identitas dan Kerumitan Komunikasi

Public Sphere, Identity Politics and Communication Complexity

Neka Fitriyah¹ Eko Wahyono² Rahmawati Zulfiningrum³

¹Prodi Ilmu Komunikasi Untirta. Jln. Raya Tirtayasa Sindangsari Pabuaran Serang 42163

²Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Tanggerang.

Jln. Perintis Kemerdekaan 1 Babakan Cikokol Tangerang Banten 115118

³Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara

Jln. Imam Bonjol No 207 Pandrikan Kidul Semarang 50131

Penulis Korespondensi: Telpon. +6285217874082; e-mail: neka_fitriyah@untirta.ac.id

Abstrak

Ruang publik merupakan ruang yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengaspirasikan ide, gagasan dan pemikirannya. Musrenbangdes salah satu bentuk ruang publik dimana gagasan ide dan pemikiran masyarakat dibutuhkan dalam menyusun program pembangunan. Dalam praktiknya ruang publik dalam Musrenbangdes menemui berbagai kendala. Persoalan status, peran, kewenangan, kompetensi komunikasi dan politik identitas menjadikan ruang publik tidak lagi netral. Penelitian ini bertujuan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberfungsian ruang publik, mengidentifikasi politik identitas dan memetakan persoalan komunikasi yang terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberfungsian ruang publik perlu disertai upaya pengimplementasian prinsip ruang publik yakni kesetaraan, kesempatan dan penghargaan terkait dengan dialog. Politik identitas terbentuk dan terinternalisasi dalam diri aktor mencerminkan kekuatan dan kemampuan seseorang dalam membangun opini publik. Proses komunikasi dalam Musrenbangdes terkait dengan kompetensi komunikasi yang tidak merata dan tidak dapat dimiliki oleh semua aktor.

Kata Kunci : Ruang publik, Politik identitas dan Komunikasi pembangunan

Abstract

Public sphere is a space that gives freedom to the public to aspire to their ideas, ideas and thoughts. Musrenbangdes is a form of public sphere where people's ideas and thoughts are needed in formulating development programs. In practice, the public sphere in the Musrenbangdes encounters various obstacles. Issues of status, role, authority, communication competence and identity politics make the public sphere no longer neutral. The purpose of this study is to identify and analyze the functioning of public sphere, identify identity politics and map communication problems that occur. The research method uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques with in-depth interviews, observation and documentation. This study concludes that the functioning of the public sphere needs to be accompanied by efforts to implement the principles of the public sphere, namely equality, opportunity and rewards related to dialogue. Identity politics is formed and internalized within the actor reflects the strength and ability of a person in building public opinion. The communication process in Musrenbangdes is related to the communication competence that is not evenly distributed and cannot be possessed by all actors.

Keywords : Public sphere, identity politics and development communication

PENDAHULUAN

Sepanjang penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, persoalan pembangunan di Provinsi Banten salah satunya masih berkisar pada persoalan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Regulasi dan arah pembangunan yang dibuat pemerintah provinsi masih belum menjadikan Pandeglang terbebas dari kemiskinan (Sumiyarti 2019). Kondisi ini dipertajam dengan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 24.790 orang 2017 dari sebelumnya berjumlah 675.040 orang pada Maret 2018, atau naik 0,14 poin (Badan Pusat Statistik Pandeglang 2018). Permasalahan ini salah satunya disebabkan program pembangunan banyak terkendala dan belum berdampak pada penguatan kapasitas masyarakat. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan.

Yunas (2017) untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan memerlukan kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan akses. Literasi pembangunan dan kompetensi komunikasi serta akses masyarakat terhadap pemerintahan menjadi salah satu penyebab masyarakat belum terlibat sepenuhnya. Keterwakilan kelembagaan masyarakat seperti BPD, Kadus, Gapoktan, LPMD, PKK, Posyandu, MUI ketika pengambilan keputusan pembangunan, dalam praktiknya banyak menemui kendala. Tidak semua aktor dalam kelembagaan tersebut memiliki kompetensi komunikasi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan akses kemudian dapat menjadi subjek pembangunan.

Pola keterwakilan kelembagaan dalam ruang publik yang digagas pemerintah ini, menambah panjang deretan faktor mengapa masyarakat luas tidak dilibatkan sepenuhnya dalam ruang publik. Di sisi lain, pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan identitas yang lekat dalam dirinya, sebenarnya memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Deswimar 2014: Kusumawarta dan Sjaf 2018). Banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat terlibat dan dilibatkan aktif dalam pembangunan. Tetapi kemudian, kekuatan ini bersimpangan dengan berbagai kepentingan yang berpengaruh terhadap orientasi, ide dan gagasan *elite* dalam ruang publik. Implikasinya adalah masyarakat semakin terkendala untuk mengakses dan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Ruang publik yang ada, kemudian menjadi sarana kontestasi untuk memperlihatkan peran dan posisi *elite* dalam pembangunan. Lebih lanjut, Saragintan & Hidayat (2007), Hudaeri (2003) menggambarkan bahwa, *elite* lokal dalam ruang publik tidak lagi menjadi sosok tokoh yang dapat menginspirasi gagasan dan ide masyarakat dalam pembangunan.

Fenomena lain yang berkembang di masyarakat Pandeglang adalah, kuatnya struktur kultur masyarakat serta pandangan agama yang mempengaruhi perilaku masyarakat (Karomani, 2017). Persoalan tradisi menghormati tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah mutlak bagi masyarakat pandeglang. Implikasinya adalah bahwa pesan yang disampaikan dinilai sebagai *petuah* yang harus dilaksanakan. Kuatnya identitas tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam bermasyarakat dan pembangunan memposisikan kedua tokoh ini menjadi tokoh sentral. Pandangan bahwa ujaran ulama merupakan *petuah* adalah sebuah pandangan yang sangat kuat dan sulit hilang. Ketakutan masyarakat membantah apa yang disampaikan tokoh agama bukan tanpa keyakinan. Asep dkk (2015) masyarakat meyakini bahwa jika tidak menjalankan apa yang di *tintah* kan ulama (tokoh agama) maka akan mendapatkan *katulah*. Karenanya identitas ulama sebagai tokoh agama menjadi mengakar serta mempengaruhi perilaku dan orientasi berfikir masyarakat khususnya dalam ruang publik.

Pada posisi inilah ruang publik rentan dimasuki ruang *privat* yang berimplikasi pada pengabaian prinsip ruang publik: penghargaan, kesetaraan serta kesempatan. Realitas ini

memunculkan asumsi yang menjadi praduga persoalan penelitian yakni ruang publik dalam praktik pembangunan hanya mungkin terwujud bila ada kesadaran kritis antar seluruh aktor (*stakeholders*), menanggalkan identitas dan kepentingan. Identitas idealnya tidak lagi menjadi simbol konsensus dan legitimasi, tetapi sebagai kekuatan dalam membangun kesadaran kritis. Fenomena bahwa ruang publik dipenuhi dengan identitas kelompok atau golongan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Yang terjadi kemudian adalah pertarungan identitas dan pertarungan wacana yang rentan menjadikan ruang publik terdistorsi.

Pertemuan Musrenbang desa merupakan sarana ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat dalam persoalan pembangunan. Dari Musrenbang desa tersebut muncul berbagai rekomendasi yang diajukan sebagai program kerja pada tahun mendatang. Musrenbang desa sebagai ruang publik, memunculkan ide gagasan untuk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Persoalannya adalah ruang publik yang bagaimanakah yang dapat dijadikan sarana pembangunan dan penyadaran kritis masyarakat. Benarkah bahwa ruang publik yang ada benar-benar dapat mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Apasajakah kompetensi yang harus dimiliki masyarakat agar dapat dilibatkan dalam ruang publik tersebut dan apakah ruang publik yang ada sudah terbebas dari berbagai kepentingan, simbol dan identitas kelompok.

Persoalan dan pertanyaan di atas adalah permasalahan yang sering dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, khususnya di Kab. Pandeglang. Karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberfungsian ruang publik, mengidentifikasi politik identitas dan memetakan persoalan komunikasi yang terjadi. Lebih lanjut penelitian ini *urgent* dilakukan sebagai upaya mencari solusi dan alternatif dari persoalan ruang publik dan dapat dijadikan evaluasi serta rekomendasi bagi konsep komunikasi pembangunan dan kemajuan pembangunan daerah setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bagi Denzim dan Lincoln (2009) merupakan tempat beragam eskalasi praktik penelitian yang memiliki makna berbeda pada setiap dan mempengaruhi corak ruang publik di Pandeglang. Tahapnya. Peneliti kemudian mempelajari *setting* sosial dan *setting* politik dengan cara membangun pemahaman atau interpretasi terhadap makna yang dimaksud oleh *elite lokal*. Sedangkan instrumen penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama serta pemerintah desa. Tahap selanjutnya, peneliti memilih strategi studi kasus Musrenbang desa (Musrenbangdes) sebagai basis pemahaman terkait keberfungsian ruang publik, politik identitas dan kompetensi komunikasi aktor yang didasarkan pada perbedaan nilai, kepercayaan dan *scientific theory*. Dikatakan studi kasus karena terdapat *gap* antara fenomena dengan konteks yang ada (Borbasi 2004) dan merupakan metode untuk meneliti realitas yang terjadi pada *real life context* (Yin 2003). *Real life context* disini terkait persoalan-persoalan empiris terkait keberfungsian ruang publik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan peneliti terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, BPD, pengurus PKK, MUI, Gapoktan, PKK, Karang Taruna yang terlibat aktif dalam Musrenbangdes dan ruang publik. Data yang dicari dalam wawancara ini terkait ruang publik, politik identitas dan kerumitan komunikasi yang dibagi pada beberapa dimensi: (1) Ruang publik terdiri dari kesetaraan, kesempatan dan penghargaan (2) Dimensi politik identitas terdiri dari: simbol, peran sosial politik, kemampuan membangun opini dan

akses (3) Dimensi Kompetensi komunikasi terdiri dari: literasi, argumentasi dan kemampuan berdialog.

Observasi dilakukan peneliti dengan cara kunjungan lapangan terhadap objek kasus untuk mengklarifikasi dan membuktikan keseluruhan data yang didapat. Observasi ditujukan untuk mengamati pembicaraan, dialog dan pesan yang dibangun dalam mencapai konsensus dalam Musrenbang desa dan ruang publik. Adapun ruang publik yang diobservasi Musrenbang desa di Desa Kananga, Desa Girijaya, Desa Cigandeng, Desa Ciandur, Desa Pasireurih, Desa Langensari, Desa Menes dan Desa Purwareja. Observasi musrenbang desa terkait ruang publik, politik identitas dan kompetensi komunikasi aktor. Observasi juga terkait data perilaku dan pembicaraan pembangunan yang mengarah pada praktik ruang publik.

Perspektif Konstruktivis

Paradigma konstruktivis berasumsi bahwa praktik komunikasi politik *elite* lokal merupakan isu fenomenal dan merupakan realitas lokal yang dikonstruksi secara spesifik. Barger dan Luckam (1996) perspektif konstruktivis menganggap ruang publik dan praktik komunikasi politik merupakan representasi dari ragam bentuk konstruksi mental pada situasi sosial yang bersifat lokal dan spesifik. Konstruktivis melihat bahwa setiap pernyataan, pesan, simbol yang digunakan adalah tindakan penciptaan makna untuk mencapai konsensus. Ardianto, Elvinaro dan Anees (2007) mempertegas bahwa subjek melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu. Melalui perspektif konstruktivis, komunikasi tidak hanya dikonstruksi oleh budaya atau kognisi seseorang, tetapi komunikasi mengandung ideologi tertentu (Mulyana 2001). Ideologi-ideologi yang tersembunyi yang mendasari komunikasi politik *elite* lokal dalam ruang publik inilah kemudian ditelusuri, diungkap dan dikonstruksikan untuk kemudian dicarikan kebenarannya.

Dengan paradigma ini, peneliti mengkonstruksi keberfungsian ruang publik dalam Musrenbangdes yang tidak hanya ada pada realitas objektif di luar tinjauan, tetapi juga realitas subjektif yang melekat dalam diri orang yang diteliti. Realitas ruang publik dicari penjelasan serta keterkaitan sebab akibatnya sehingga peneliti menemukan realitas tersembunyi secara subjektif dan khas. Dalam aspek aksiologinya, perspektif konstruktivis tidak memisahkan nilai lokalitas yang *inherent* dalam kepribadian seseorang. Nilai-nilai lokalitas dijadikan sumber informasi dalam menentukan fakta sosial sekaligus memperlakukan informan sebagai individu yang berkontribusi dalam memberikan informasi.

Proses Pelaksanaan Penelitian

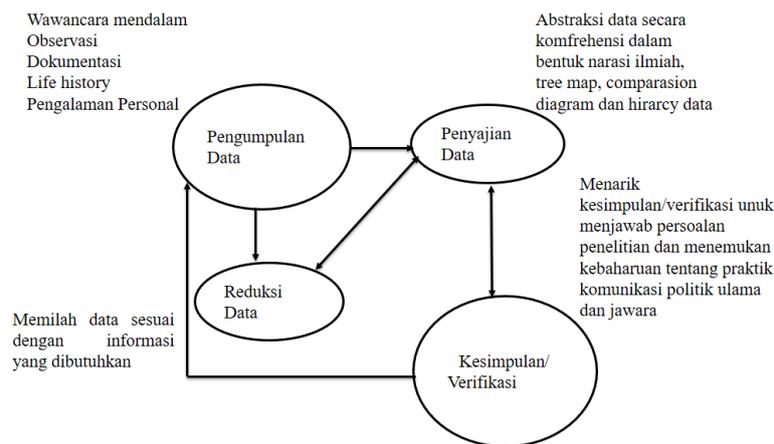
Penelitian dilakukan selama empat bulan: Februari-Mei 2020 di Kab Pandeglang. Empat bulan peneliti optimalkan se-efisien mungkin untuk memperoleh data (berupa dokumen, wawancara dan observasi) terkait keberfungsian ruang publik dan praktik komunikasi politik *elite* lokal dalam pembangunan secara komprehensif. Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian yang bersifat non *linier*. Artinya, langkah-langkah penelitian dilakukan secara fleksibel, bisa kembali ke langkah awal jika dirasa perlu atau langsung ke tahap yang lebih jauh bila data sudah mencukupi. Peneliti kemudian melakukan pengkategorian informan menjadi dua yakni (1) Key informan dan (2) Informan. Key informan adalah individu yang benar-benar terkait langsung dan secara intensif berentuhan dengan Musrenbangdes. Penentuan key informan dilakukan dengan teknik *snowball*: Informan yang satu merekomendasikan informan lainnya dan begitu seterusnya. Jumlah key informan yang diwawancarai sebanyak 24 orang yang tersebar di delapan desa.

Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian berkaitan dengan keberfungsian ruang publik. Fokus penelitian terdiri dari individu dan kelompok sebagai aktor, organisasi kemasyarakatan. Pengamatan yang dilakukan pada level mikro serta faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan pengembangan ruang publik seperti aspek sosial, budaya (*indigenous knowledge*) / Fokus penelitian menekankan pada proses komunikasi yang berlangsung dalam ruang publik ketika perumusan program pembangunan dalam Musrenbangdes.

Teknik Analisa Data

Creswell (2003, 2012) menjelaskan analisis data merupakan proses refleksi terus-menerus terhadap data dengan mengajukan pertanyaan analitis, membuat catatan singkat sepanjang penelitian. Data dianalisis dengan memberi kode dan menempatkan data tersebut berdasarkan kesesuaian tema. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema dan dianalisis secara manual untuk mengidentifikasi hasil akhir penelitian (Yin 2003). Proses analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992).



Gambar 1 Model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992)

Adapun proses reduksi yang dimaksud seperti di bawah ini:

- (1) Pengumpulan data (*data condensation*) mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan atau mengubah data yang muncul dalam korpus. Melalui proses pengumpulan data, maka data menjadi lebih kuat (meminimalisir reduksi/pengurangan data).
- (2) Penyajian data (*data display*)
Menampilkan data dalam pembahasan dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.
- (3) Penarikan Kesimpulan (*conclusions: drawing/verifying*)
Peneliti melakukan tahap penarikan kesimpulan dengan dilakukan dengan cara menjawab tujuan dan permasalahan penelitian secara terbuka dan sesuai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musrenbangdes sebagai ruang publik

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan pertemuan formal lanjutan dari Musdes, sebagai tindak lanjut dari program-program yang diajukan. Dalam pertemuan Musdes aktor-aktor yang terlibat lebih banyak, karena Musdes merupakan gabungan dari aktor-aktor yang terlibat dalam Musdes dalam satu kelurahan. Musdes umumnya diadakan satu kali dalam setahun menjelang diadakannya Musrenbangdes kecamatan yang membahas tentang usulan-usulan yang diajukan. Walaupun Musrenbangdes merupakan forum lanjutan dari Musdes, tidak semua aktor yang terlibat dalam Musdes terlibat juga dalam Musrenbangdes. Khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat sedikit sekali yang nampak, walaupun nampak adalah mereka yang mewakili kelembagaan di tingkat desa dan atau tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjabat sebagai Gapoktan atau kadus. Dalam pertemuan Musrenbangdes ini, aparatur desa, RT, RW, Gapoktan, PKK, Kadus lebih banyak hadir dibandingkan dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

Kegiatan dimulai dengan acara seremonial pembukaan yang disertai sambutan-sambutan dari pihak desa, polsek dan kodim setempat serta dari Camat. Selanjutnya setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan dengan dialog-dialog terkait program pembangunan. Pemerintah desa dalam pertemuan Musrenbangdes ini, menyampaikan arahan dan pandangan terkait program-program pembangunan. Dalam arahan tersebut, kepala desa menyampaikan berbagai target dan prioritas pembangunan pemerintah daerah yang perlu didukung oleh pemerintah desa. Misalnya menjadikan Pandeglang sebagai kawasan wisata, Pandeglang sebagai wilayah yang hortikultura unggulan daerah dll. Kepala desa juga menyampaikan program unggulan dan prioritas yang ingin dicapai, misalnya perbaikan infrastruktur jalan, sanitasi air, irigasi dan kegiatan sosial. Selanjutnya, peserta dibagi dalam empat komisi dalam membahas program pembangunan desa. (1) Komisi pembangunan sosial dan kesejahteraan, (2) Komisi pendidikan kesehatan dan keagamaan (3) Komisi pembangunan infrastruktur (4) Komisi Pembangunan Pertanian.

Pertemuan Musdes pada akhirnya untuk menyamakan pandangan dan persepsi terkait agenda (kepentingan) yang diajukan dalam Musdes juga mengakselerasikan program desa dan pemerintah daerah. Dialog tentang program-program pembangunan kemudian berujung pada akselerasi program dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah daerah. Lebih lanjut, dialog tentang program kerja yang sifatnya spesifik dan kebutuhan khas desa, itulah yang menjadi bahan dialog antar aktor yang terlibat. Program prioritas pemerintah daerah dianggap sebuah wacana yang tidak perlu didiskusikan kembali dalam Musrenbangdes. Argumentasinya adalah pemerintah desa dan masyarakat hanya tinggal mengakselerasikannya. Dialog yang terjadi dalam Musrenbangdes terkait program pembangunan berlangsung satu arah dan lebih mengarah pada rekomendasi-rekomendasi dalam bentuk tulisan dari masing-masing komisi. Dialog terjadi di awal kegiatan ketika berlangsung pengarahan dari aparatur desa yang kemudian muncul tanya jawab.

Dari beberapa Musrenbangdes Desa Kananga, Desa Girijaya, Desa Cigandeng, Desa Ciandur, Desa Pasireurih, Desa Langensari, Desa Menes dan Desa Purwareja., kegiatan berlangsung lancar sesuai dengan alur kegiatan yang sudah disusun. Proses komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat, lebih untuk mengkonfirmasi program-program yang sudah dirumuskan dalam Musdes. Karenanya komunikasi tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kades dalam bentuk *lobby-lobby* program pembangunan. Keberadaan tokoh

agama dan tokoh masyarakat dianggap penting oleh seluruh *stakeholders* karena diposisikan sebagai kasepuhan yang dapat memberikan pandangan dan berkah bagi kegiatan dan program pembangunan yang akan diajukan.

Untuk menjelaskan temuan ilmiah dalam ruang publik di kegiatan Musrenbangde di Desa Kananga, Desa Girijaya, Desa Cigandeng, Desa Ciandur, Desa Pasireurih, Desa Langensari, Desa Menes dan Desa Purwareja, berikut matrik konstruksi komunikasi dan ruang publik Musrenbangdes sebagai temuan dan acuan dalam mengeksplorasi kebaruaran.

Tabel 1 Matrik konstruksi komunikasi dan ruang publik Musrenbangdes

Prinsip Ruang Publik	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat	Kelembagaan	Masyarakat
Kesempatan	Diberi kesempatan istimewa dan seluas-luasnya	Terbuka luas dan dimanfaatkan untuk sharing pengalaman	Mendapatkan kesempatan dan memberi kesempatan peserta	Mendapatkan kesempatan dan digunakan untuk menyetujui program
Kesetaraan	Setara dengan semua aktor Ada penguasaan wacana opini Sulit terepresentasikan	Setara dengan pemerintah, tetapi tidak setara dengan masyarakat	Setara dengan para elite ataupun dengan pemerintah, tidak dengan masyarakat	Tidak setara karena ada perbedaan peran dan status sosial serta kompetensi
Penghargaan	Saling menghargai sesama aktor dan masyarakat	Saling menghargai sesama aktor muncul sikap elitis	Saling menghargai dan muncul sikap elitis	Menghargai karena berhadapan dengan elite
Peran	Tokoh masyarakat dan inovator pembangunan	Tokoh masyarakat, politisi dan pengusaha	Birokrat, mitra masyarakat dan pengusaha	Mitra, pelaksana lapangan
Relasi	Kekeluargaan, patrimonial Menggunakan pendekatan agama, struktur dan kultural	Kekeluargaan dan kolegal Menggunakan pendekatan struktural kultural	Kekeluargaan dan kolegal Menggunakan pendekatan struktural dan prosedural	Kekerabatan dan patrimonial Mengikuti dan menyepakati arahan dari ulama dan jawara
Konteks dan konten pesan	Berbentuk rekomendasi-rekomendasi Kebermanfaatan program bagi produktivitas masyarakat Kesadaran kritis	Disampaikan secara tidak langsung Orientasi pada program pembangunan	Keharusan mengikuti mekanisme dan adminitrasi Penguatan kapasitas masyarakat Komitmen bersama Kondisi sosial politik	Tidak banyak mempertanyakan prosedur dan mekanisme Turut mendukung program pembangunan Percaya dengan yang disampaikan ulama dan jawara

Sumber: Elaborasi peneliti

Untuk mengurai konstruksi Musrenbangdes tersebut pembahasan ini mengacu pada dua aspek yakni: (1) Konteks pesan yang disampaikan (2) Efek komunikasi. Pertama konteks pesan. Konteks pesan yang disampaikan tokoh agama-tokoh masyarakat-pemerintah-masyarakat terfokus pada kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Dialog terjadi karena masing-masing aktor menginginkan program yang diajukan dalam Musdus dapat terealisasikan. Permasalahan yang melatar belakangi dialog ini adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua program yang diajukan dapat direalisasikan pada tahun yang

sama. Konteks pesan inilah yang menyebabkan program pembangunan memiliki skala prioritas.

Benturan wacana dan gagasan dalam pertemuan Musdes terjadi karena anggaran yang terbatas, akselarai program pemerintah, program pembangunan yang belum terealisasi dan kebutuhan yang mendesak. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi air pesawahan dan sanitasi lingkungan di Desa Girijaya dan Lengeunsari misalnya, menjadi bahan dialog yang konsensusnya lama tercapai. Strategi yang dilakukan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam situasi seperti ini adalah dengan mengedepankan pendekatan kultural dan *clientism*. Dengan menggunakan dua pendekatan ini, tokoh masyarakat dan tokoh agama mudah mendapatkan dukungan. Konsensus tercapai karena argumentasi dapat diterima dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Kedua efek komunikasi. Efek komunikasi dimaksudkan sebagai dampak yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan dan situasi yang terjadi. Efek komunikasi dari pertemuan Musrenbangdes Desa Kananga, Desa Girijaya, Desa Cigandeng, Desa Ciandur, Desa Pasireurih, Desa Langensari, Desa Menes dan Desa Purwareja memiliki kesamaan walaupun tidak persis. Hal ini disebabkan karena faktor kebutuhan terhadap infrastruktur jalan sangat mendesak bagi masyarakat. Baik Desa Girijaya, Desa Cigandeng dan Desa Kananga efek komunikasinya terlihat ketika masyarakat mendesak agar pemerintah memprogramkan program infrastruktur jalan di lingkungannya dalam acuan program kerja desa. Di Desa Girijaya efek komunikasi yang terbentuk adalah pemahaman masyarakat untuk tetap mendukung walaupun belum dapat dianggarkan pada tahun yang sama.

Di sisi lain, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga mengedepankan strategi relasi. Baginya, mendekati aktor-aktor yang telah lama berelasi memudahkan membangun konsensus. Relasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan kepala desa, BPD, kadus, camat, para birokrat dan politisi adalah contohnya. Menurut pandangannya, semakin banyak relasi semakin banyak kemudahan untuk mempengaruhi, apalagi jika didasari dengan hubungan *clientism* dan *patrimonial*. Dalam pertemuan Musrenbangdes Desa Kanangan, tokoh agama setempat mengajukan perbaikan infrastruktur jalan yang sudah rusak, selain jalan ini adalah jalan aktif penghubung desa-desa lainnya, jalan ini juga banyak digunakan santri setempat untuk berangkat ke madrasah ataupun pesantren. Dengan argumentasi yang dimilikinya, ajuan program infrastruktur jalan disetujui oleh semua pihak.

Efek komunikasi pembangunan yang dihasilkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah opini mayoritas tentang urgensi program pembangunan, infrastruktur jalan, irigasi dan sanitasi lingkungan. Selain itu, dengan pendekatan agama yang dilakukan, dialog yang disampaikan tokoh agama lebih mudah mencapai konsensus. Berbeda dengan efek yang dirasakan oleh aparatur desa dan masyarakat. Bagi aparatur desa, hal yang terpenting adalah pelaksanaan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Berbeda efek komunikasi yang dirasakan masyarakat ketika tokoh agama berbicara, masyarakat memiliki pandangan dan pemahaman untuk fokus pada kelancaran program saja, tidak perlu terlibat dalam pengerjaannya. Singkatnya efek komunikasi yang dihasilkan dalam pertemuan Musdes tergantung pada aktor-aktor yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Faktor kepuasan dan ketidakpuasan menjadi hal lain yang menambah varian efek yang dihasilkan.

Realitas di atas selaras dengan konsep komunikasi pembangunan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan perannya di tengah-tengah masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan komunikasi menjadi agen perubahan dengan memberikan pemahaman tentang program pembangunan. Para tokoh membantu masyarakat untuk bertindak, mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan bertindak sebagai agen perubahan untuk menyampaikan berbagai agenda pemerintah. Dalam konteks ini Arifianto (2016) komunikasi pembangunan didasarkan pada semangat untuk mengartikulasikan dan

memahami hal-hal dalam pikiran, sikap dan tindakan, termasuk cara untuk memecahkan masalah umum.

Musrenbangdes menekankan pada konfirmasi dan penegasan atas program-program yang diajukan. Beberapa Rt Rw bertanya dengan tujuan mempertegas apa yang sudah diajukan sebelumnya. Adapun prinsip ruang publik (1) Kesetaraan (2) Kesempatan (3) Penghargaan, nampak dalam pertemuan tersebut walaupun belum sepenuhnya mengacu pada konsep ruang publik yang ditawarkan Habermas (1984). Pertama kesetaraan. Kesetaraan tidak terlihat jelas, karena yang dikedepankan dalam Musrenbangdes mengarah pada sosialisasi rumusan program dan konsensus sudah dicapai sebelumnya. Kesetaraan sulit terepresentasikan karena posisi istimewa tokoh masyarakat dan tokoh agama dan pemerintah sebagai *elite*. Peran, status sosial yang berbeda memberikan penegasan bahwa partisipan yang hadir tidak setara. Kesetaraan nampak hanya pada lingkaran aktor yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang sama dalam program pembangunan. Masyarakat misalnya, merasa tidak setara karena tidak memiliki kemampuan mengkomunikasikan aspirasi dengan baik. Karenanya masyarakat dalam pertemuan ini lebih banyak diam, perannya untuk melegitimasi program.

Kedua kesempatan. Kesempatan dalam pertemuan Musrenbangdes diberikan seluas-luasnya kepada seluruh partisipan dan aktor. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya dan mengkritisi program pembangunan. Dalam praktiknya, kesempatan memang diprioritaskan kepada aktor-aktor kunci dalam program pembangunan, misalnya kepada para Rt, Rw, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan kelembagaan yang hadir. Asumsinya bahwa aktor-aktor tersebut yang lebih mengerti dengan kondisi lapangan dan mengerti tentang kondisi pembangunan di wilayahnya. Sikap seperti ini menciptakan suatu kondisi dimana kesempatan diprioritaskan pada aktor-aktor saja. Selain karena faktor waktu yang terbatas, topik-topik yang dibahas pun memiliki prioritas.

Ketiga penghargaan. Prinsip ruang publik tentang penghargaan diimplementasikan oleh sikap saling mendengarkan dan saling mendukung satu sama lain. Prinsip ini, pengimplementasiannya sangat berbeda, ketika persoalan status sosial masyarakat, *elite* dan bukan *elite* melatarbelakanginya mengemuka. Artinya dalam pertemuan Musrenbangdes, sikap penghargaan terhadap partisipan dan aktor lain lebih dikarenakan sikap hormat terhadap *elite*, bukan sikap menghargai atas pemikiran yang disampaikan. Siapa yang berbicara menentukan kepada siapa sikap menghargai itu diberikan. Walaupun tidak terlihat sikap diskriminatif, tetapi penghargaan terhadap sosok *elite* seperti kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak dapat dihindari. Penghargaan diberikan karena persoalan kultural dan otoritas, pengetahuan dan kemampuan muncul setelahnya.

Politik Identitas dan Konsensus

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Nasrudin (2018) dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Heyes, 2007). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik

identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas.

Dalam penelitian ini politik identitas dimaksudkan sebagai upaya-upaya politis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mengedepankan identitas yang lekat dalam diri dan kelompoknya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, pimpinan kelembagaan memiliki identitas yang lekat dalam dirinya untuk melakukan upaya-upaya politis. Aktor-aktor tersebut masing-masing menggunakan identitas dan simbolnya dalam membangun konsensus. Identitas mencerminkan status, peran, kewenangan, kekuatan dan kapabilitas

Tabel 2 Matrik konstruksi politik identitas aktor

	Tokoh agama	Tokoh masyarakat	Pemerintah desa	Keterwakilan lembaga	Masyarakat
Identitas	Pemimpin agama	Pemimpin informal masyarakat	Pemimpin formal desa	Keterwakilan masyarakat	Warga, penduduk atau masyarakat
Kepemimpinan	Guru ngaji	Informal	Formal	Formal	Pengikut
Simbol	Kharisma	Kharisma	Jabatan	Jabatan	Masyarakat biasa
	Pengetahuan agama	Pengetahuan kondisi lingkungan	Pengetahuan manajerial desa	Pengetahuan kelembagaan	
	Perilaku dan sikap agamis		Kewenangan, otoritas	peran dan fungsi	
Aktivitas dan Kewenangan	Melewati batas geografis	Dibatasi batas geografis	Sebatas wilayah desa	Sebatas wilayah kelompok atau bidang	Kontrol sosial Subjek pembangunan
	Memberi pengetahuan agama dan teladan masyarakat	Mengarahkan perilaku sosial politik masyarakat	Membuat dan melaksanakan program pembangunan	Menginisiasi dan melaksanakan program	
			Mengatur tata kelola pemerintahan	Membuat komitmen anggota kelompok	

Sumber : Elaborasi peneliti

Politik identitas dalam Musrenbangdes terlihat ketika aktor-aktor yang terlibat menunjukkan identitas dirinya baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur desa, keterwakilan kelembagaan ataupun ditunjukkan karena ada persamaan tujuan dan orientasi kelompok. Seorang tokoh agama yang sekaligus pengurus MUI desa misalnya, menunjukkan rasa kecewanya atas beberapa program desa yang belum terlaksana. Dengan argumentasi yang disampaikan, tokoh agama ini mengajak masyarakat luas untuk berfikir dan bersama-sama mengkritisi program pembangunan. Terlepas dari argumentasinya, pemikiran tokoh agama ini kemudian didukung oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat Langeunsari, mengikuti arahan dan nasihat ustadz, kiyai dan ulama (tokoh agama) itu merupakan bentuk kesalehan dalam beragama. Terlebih masyarakat takut mendapat *katulah* jika tidak mengikuti kebenaran yang disampaikan para tokoh agama tersebut.

Politik identitas lekat dengan sendirinya dalam pertemuan Musrenbangdes. Tokoh agama yang memiliki identitas sebagai pemimpin agama, merupakan pemimpin informal dalam hal agama. Pengetahuan agama yang dimilikinya mampu memberikan wawasan dan perubahan cara pandang masyarakat terkait pengetahuan agama. Tetapi pengaruh tokoh agama ini tidak sebatas dalam hal agama, dalam hal sosial politikpun, pengaruh tokoh agama cukup dipertimbangkan. Terlebih tokoh agama, kewenangannya tidak dibatasi oleh batas geografis.

Tokoh agama di Desa Giri Jaya misalnya, banyak diundang memberikan ceramah agama atau dilibatkan dalam kegiatan sosial di desa dan di wilayah lainnya. Popularitas tokoh agama ini yang kemudian tidak mebatasi aktivitasnya dalam memberikan pengetahuan agama, juga dalam memberikan pengarahan terhadap masyarakat. Beberapa fakta dan fenomena yang ditunjukkan dalam Musrenbangdes, bahwa seseorang (para *elite*) yang terlibat dalam pembentukan opini dan konsensus, tidak bertindak sendirian. Membangun konsensus membutuhkan pengikut, memerlukan aliansi, interaksi dan relasi, baik individu tersebut dalam posisi yang mendominasi atau didominasi. Oleh karena itu, menjadi mustahil politik identitas dapat diimplementasikan tanpa melibatkan kelompok.

Tokoh masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Menes Cigandeng misalnya, politik identitasnya terlihat ketika masyarakat atau kelompok yang dibina langsung mendukung dan melegitimasi apa yang disampaikan. Ketokohan dan identitasnya mampu mencitrakan dirinya sebagai sosok yang harus dipatuhi dan dihormati. Persoalan irigasi persawahan yang belum dapat direalisasikan di persawahan-persawahannya dapat diprogramkan. Arahan aparatur desa bahwa anggaran terbatas dan masih banyak persoalan lain yang mendesak seolah tidak lagi menjadi masalah. Pengarahan-pengarahan yang dilakukan kepala desa dijadikan referensi untuk membandingkan kebutuhan prioritas kelompok dan prioritas desa. Ada situasi dimana masyarakat dan aparatur terdiam dan menyetujui apa yang dimaksud. Pemerintah desa diperhadapkan pada situasi apakah program desa atau program pemerintah daerah yang akan dijadikan prioritas.

Politik identitas kepala desa dalam Musrenbangdes yang paling menonjol dari sekian aktor yang ada. Selain kepala desa sudah populer di tengah-tengah masyarakat, juga kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan program pembangunan. Paling sering nampak ketika kepala desa dan atau aparatur desa memberikan pengarahan dan wacana pembangunan serta daya dukung pemerintah desa atas program pembangunan. Arahan yang diberikan di sisi lainnya, secara tidak langsung menggiring opini dan membatasi ruang berfikir masyarakat. Kepala desa menyampaikan dengan tegas bahwa seluruh program harus mengikuti prosedur administrasi dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan. Dalam konsepsi ruang publik Habermas (1984), situasi ini dimaknai sebagai upaya membangun opini publik yang mengintervensi kebebasan masyarakat untuk mengkritisi pembangunan. Di sisi lainnya, Abdurrahman (2014) menjelaskan bahwa arahan yang disampaikan pemerintah terkait kebijakan dan regulasi pemerintah melumpuhkan inovasi dan kesetaraan masyarakat. Smith (1984) menyatakan bahwa, kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata.

Otoritas dan kewenangan kepala desa dalam mengatur dan mengarahkan program pembangunan menjadi wujud intervensi kebebasan berfikir dalam ruang publik. Kewenangan kepala desa dalam ruang publik tercermin dengan intervensi melalui pembentukan opini mayoritas. *Elite* lokal, leluasa membangun opini atas nama prinsip pemerataan dan keadilan, prosedur, mekanisme dan target program. Kuasa politik *elite* lokal dalam ruang publik, membuat ruang publik menjadi terdistorsi dan tidak mencerminkan nilai-nilai *genuinitas*. Komunikasi politik *elite* lokal dalam perspektif komunikasi pembangunan partisipatif dipandang sebagai proses jangka panjang yang dan terkait dengan kondisi sosial struktural masyarakat. Karenanya komunikasi politik *elite* lokal erat kaitannya dengan upaya penyadaran kritis masyarakat yang sangat relevan dengan konsep komunikasi pembangunan partisipatif.

Bebeda dengan politik identitas yang lekat dalam sosok yang mewakili kelembagaan seperti BPD, PKK, Gapoktan, MUI dan Karang Taruna. Politik identitasnya tidak terlampau nampak, karena kelembagaan ini lekat dalam kepengurusan pemerintah desa dan menjadi mitra pelaksana program pembangunan. Politik identitas bagi kelembagaan ini, terlihat dengan relasi kolegial dengan pemerintah desa. Bagi mereka identitas menunjukkan kuasa

relasi antar aktor dalam pembangunan. Implikasinya adalah kepala desa merasa penting untuk mengakomodir agenda yang diajukan. Sisi lainnya, dalam Musrenbangdes di Desa Ciandur dan Cigandeng misalnya, tidak semua peserta mengenal pengurus kelembagaan yang dimaksud tetapi aparat desa sangat mengenalnya. Aktivitas dialog pembangunannya tidak terlampaui dinamis, yang ada hanya pemaparan kebutuhan lembaga yang perlu diprogramkan secara mendesak. PKK di Ciandur yang mengajukan peralatan kegiatan Posyandu dari mulai timbangan sampai pada pengadaan sekretariat yang dapat diakses seluruh masyarakat. Begitu juga dengan Karang Taruna yang mengajukan beberapa program pemberdayaan pemuda seperti pelatihan IT dll.

Politik identitas dalam kegiatan Musrenbangdes lekat dan terikat pada simbol, peran, status dan kewenangan yang berimplikasi pada relasi kuasa politik dan pembentukan opini publik. Dalam realitasnya politik identitas, lebih mudah dilakukan oleh sosok atau kelompok yang sudah populer di kalangan masyarakat. Kelompok yang belum populer di kalangan masyarakat, secara tidak langsung akan mendekati sumber kekuasaan, agar aspirasinya dapat didengar. Hubungan relasional dengan pemerintah dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama dan juga sebaliknya dalam ruang publik, mencerminkan relasi politik yang tidak bisa dihindari. Karenanya politik identitas membutuhkan keberimbangan dan kesetaraan peran, status dan akses agar kegiatan dialog dalam ruang publik (Musrenbangdes) berjalan tanpa ada marginalisasi dan atau kooptasi.

Kompetensi komunikasi dan kerumitan komunikasi

Spitzberg (1988) kompetensi komunikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi baik dengan orang lain, merujuk pada ketepatan, kejelasan, komprehensibilitas, koherensi, efektivitas keahlian, dan kesesuaian dalam berbicara. Spitzberg dan Cupach (1989) DeVito (1992) menjelaskan bahwa kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Sementara itu Singh (2002) menyebutkan kompetensi komunikasi sebagai kemampuan untuk menyatakan, menyimak, mendengar, mendokumentasikan, menyampaikan, berdebat dan menganalisa dengan menggunakan berbagai perangkat komunikasi. Adyawanti (2019) dari semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang, pengetahuan dan keterampilan menyangkut komunikasi termasuk diantara yang paling penting dan berguna.

Kompetensi komunikasi dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan aktor dalam menyampaikan pendapat, berargumen, mempertahankan pendapat dan memperoleh dukungan publik. Kompetensi komunikasi dalam Musrenbangdes pada akhirnya memposisikan siapa yang memiliki kemampuan menyampaikan pendapat, berdebat, menggiring opini dan siapa yang hanya menjadi kelompok pendukung. Untuk dapat berkomunikasi semacam itu, mensyaratkan tindakan komunikatif dengan klaim-klaim kesahihan: klaim kebenaran, kesahihan, kejujuran dan klaim komprehensifitas (Habermas, 1987). Dalam dimensi tersebut, klaim-klaim yang diperdebatkan dengan argumen tanpa harus menggunakan kekuatan lain kecuali rasio dan dasar (Habermas, 1981). Pada realitasnya tidak semua yang hadir dalam Musrenbangdes memiliki kompetensi komunikasi yang sama.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, kompetensi komunikasi yang dimiliki masyarakat menjadi beragam, terlebih jika dikaitkan dengan literasi pembangunan. Selain terkait dengan akses informasi juga terkait dengan keterbukaan informasi dari pemerintah setempat. Dalam konsepsi Habermas, tindakan komunikatif dalam ruang publik sebagai perjuangan kelas melalui “perbincangan rasional” dan dalam bentuk perbincangan komunikasi dalam posisi sejajar. Kompetensi komunikasi dalam praktik Musrenbangdes seperti dalam hasil observasi masih menunjukkan adanya perbedaan peran, status dan akses yang menyebabkan dialog tidak mencerminkan prinsip-prinsip ruang publik.

Tabel 3 memetakan bagaimana kompetensi komunikasi dan kerumitan komunikasi yang terjadi.

Tabel 3 Matrik kompetensi komunikasi dan kerumitan komunikasi

Peran	Argumentasi	Pengaruh	Akses
Tokoh masyarakat Posisi istimewa di tengah-tengah masyarakat	Jelas, tegas, berdasarkan kondisi sosiologis dan kebutuhan masyarakat serta rasional.	Membentuk opini publik, dukungan masyarakat	Memiliki akses terhadap informasi baik secara mandiri maupun kelompok
Tokoh agama Pemimpin informal dan posisi istimewa di tengah-tengah masyarakat	Jelas, tegas, dikaitkan dengan kaidah agama, kaidah normatif. Mengacu pada kondisi sosiologis masyarakat.	Opini publik, dukungan masyarakat, legitimasi dan konsensus	Memiliki akses dan diberi akses informasi pembangunan baik secara mandiri maupun kelompok
Kepala Desa Pemimpin formal, memiliki kewenangan mengatur dan mengarahkan pembangunan	Jelas, tegas, berdasarkan kaidah administratif dan kewenangan, mendedapnkan otoritas.	Dukungan, legitimasi dan opini publik	Akses penuh terhadap informasi pembangunan serta fasilitas penuh terhadap pembangunan
Pengurus lembaga Keterwakilan kelembagaan, diberi akses untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan program	Jelas, kooperatif, dan koordinatif berdasar pada kebutuhan lapangan dan pengembangan kelompok.	Dukungan, kerjasama dan sinergi dengan pemerintah	Akses penuh terhadap informasi pembangunan berbasis kelompok
Masyarakat	Jelas, menjadi pengikut dan berdasarkan kepercayaan terhadap <i>elite</i>	Dukungan dan legitimasi	Akses terbatas hanya yang memiliki peran struktural yang dapat akses langsung formal

Sumber : Elaborasi peneliti

Matrik di atas memetakan tentang proses komunikasi dan pesan yang disampaikan oleh aktor dalam kegiatan ruang publik Musrenbangdes. Pada dasarnya kompetensi komunikasi dalam Musrenbangdes dapat diurai dilihat ketika aktor menyampaikan pendapat. Dari argumen yang disampaikan, kemampuan menggiring opini publik dan kemampuan memberikan penyadaran kritis kepada masyarakat. Kemampuan berargumen aktor misalnya, terkait dengan konten pesan yang disampaikan jelas, tidak ada kalimat ambigu dan dapat dimengerti oleh peserta lain. Kemampuan menggiring opini terkait dengan kemampuan mempengaruhi pemikiran orang lain agar mengikuti ide atau gagasan yang disampaikan. Sedangkan kemampuan memberikan penyadaran kritis terkait dengan perubahan cara pandang dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang harus dimiliki, dialog dalam Musrenbangdes hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kompetensi tersebut. Sementara untuk mendialogkan program dan persoalan pembangunan, membutuhkan banyak ide gagasan dan aspirasi.

Posisi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang istimewa di tengah-tengah masyarakat, memudahkan aktor tersebut dalam membentuk opini kelompok menjadi opini publik. Dukungan sukarela publik terbentuk karena pola relasi yang sudah lama dibangun dan saling mengikat antar tokoh dan masyarakat, sehingga ketika tokoh tersebut menyampaikan

pendapat dan gagasan masyarakat menerimanya tanpa ada paksaan. Peran dan posisi ini sangat berbeda dengan kepala desa dan aparatur desa. Kepala desa dituntut memiliki kompetensi komunikasi untuk menjelaskan program-program pembangunan terhadap masyarakat. Dengan menjelaskan program desa dan program prioritas kepada masyarakat, kepala desa berharap mendapat dukungan dari masyarakat dengan mudah. Artinya ada upaya rasional agar masyarakat memiliki literasi pembangunan atas program yang akan dicanangkan.

Berbeda hal dengan perwakilan kelembagaan dan masyarakat. Keterwakilan kelembagaan masih memiliki posisi istimewa secara struktural pemerintahan desa yang berimplikasi pada akses dan keberanian menyampaikan aspirasi. Program Gapoktan di Ciandur dan Cigandeng misalnya, digagas oleh Gapoktan yang memiliki hubungan relasional yang bagus dengan pemerintah desa. Pengajuan bantuan benih tanaman dan bibit untuk peternakan ikan tawar dapat dengan mudah diprogramkan. Selain program tersebut dibutuhkan oleh beberapa kelompok tani, juga karena faktor kemudahan akses informasi pembangunan yang diberikan. Berbeda jauh dengan posisi masyarakat yang tidak memiliki akses dan hanya menjadi pendukung program pembangunan. Karenanya kelompok masyarakat ini lebih banyak menyampaikan aspirasinya kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk kemudian disampaikan dalam forum Musrenbang.

Kerumitan komunikasi dalam Musrenbangdes, merupakan representasi dari persyaratan kompetensi komunikasi yang tidak semua aktor dapat memenuhinya. Sisi lainnya bahwa ruang publik membutuhkan argumentasi logis dalam berdialog. Kelogisan berfikir terkait dengan literasi pembangunan yang tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Kondisi sosiologis, kultural, kemampuan ekonomi menambah panjang persoalan literasi pembangunan bagi masyarakat. Bahwa peran, status sosial ekonomi dan posisi seseorang di tengah-tengah masyarakat menentukan seberapa kuat akses yang dimilikinya. Kejelasan dalam menyampaikan pesan terkait pelapalan dan pemilihan kata yang tepat. Penyusunan kata menjadi sebuah kalimat dan gagasan adalah proses kognitif yang memerlukan pengetahuan dan kecakapan. Hal lainnya adalah kecakapan dalam membentuk opini publik terkait dengan kapasitas dan pengaruh yang perlu juga dikuasai ketika berdialog.

Prasyarat kompetensi komunikasi dalam menyampaikan aspirasi ide dan gagasan dalam dialog ruang publik menambah panjang kompetensi komunikasi yang perlu dimiliki masyarakat. Dengan kompetensi komunikasi setidaknya masyarakat memiliki kesetaraan dengan aktor lainnya ketika berdialog. Seperti diketahui bahwa dialog mensyaratkan argumentasi, kesetaraan dan penghargaan satu sama lain. Dalam praktiknya, kompetensi komunikasi justru membatasi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam dialog pembangunan. Masyarakat kemudian menyampaikan aspirasi ide dan gagasannya kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan informal.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, pembahasan yang disampaikan di atas mengungkap berbagai persoalan serta temuan terkait keberfungsian ruang publik, politik identitas dan komunikasi dalam Musrenbangdes. Keberfungsian ruang publik perlu disertai upaya pengimplementasian prinsip ruang publik yakni kesetaraan, kesempatan dan penghargaan dalam pertemuan Musrenbangdes. Keberfungsian ruang publik terkait dengan dialog sebagai representasi dari pertemuan ide, gagasan dan aspirasi. Peran, status, otoritas dan kewenangan perlu ditanggalkan dalam ruang publik, karena akan

menghambat terjadinya dialog dan pembatasan berfikir dan partisipasi masyarakat. Politik identitas terbentuk dan terinternalisasi dalam diri aktor. Identitas dalam ruang publik mencerminkan kekuatan dan kemampuan seseorang dalam membangun opini publik. Politik identitas terlihat dari pengetahuan, simbol dan jiwa kepemimpinan yang lekat dalam diri seorang aktor. Tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa dan keterwakilan kelembagaan memiliki identitas khas yang tidak dapat dipertukarkan. Kekhasan ini kemudian dijadikan sarana dalam membangun opini publik dan memperoleh dukungan masyarakat. Proses komunikasi yang berlangsung dalam Musrenbangdes terkait dengan kompetensi komunikasi yang tidak merata dan tidak dapat dimiliki oleh semua aktor. Kerumitan komunikasi kemudian memberikan corak tersendiri dalam keberfungsian ruang publik.

Penelitian ini berimplikasi pada dua hal yakni teoritik dan praksis. Secara teoritik, ruang publik dalam konsepsi Habermas (1984) sulit diterapkan pada masyarakat yang sangat heterogen baik dari sisi pengetahuan, peran, akses, kondisi sosial politik. Ruang publik membutuhkan kesetaraan, kesempatan dan penghargaan satu sama lain yang hanya dapat diperoleh jika seluruh aktor memiliki status dan peran yang sama. Faktor sosiologis menjadikan konsepsi ideal ruang publik sulit diterapkan, sehingga dibutuhkan ruang publik alternatif yang memudahkan dan meluaskan peran partisipasi masyarakat. Secara praktis, ruang publik dalam Musrenbangdes perlu dinetralkan dari berbagai agenda dan kepentingan yang membatasi ruang berfikir masyarakat. Otoritas dan kewenangan aparatur dalam memberikan pengarahan ketika Musrenbangdes perlu sebagai upaya memberikan kesadaran kritis bukan sebaliknya sebagai upaya membatasi ruang aspirasi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benjamin. "Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpukan Inovasi Pembangunan Daerah." *Jurnal Pembangunan Daerah*, II (2) (2014): 51-67.
- Adyawanti, T. 2019. Kompetensi Komunikasi. *ProListik*, 2(1).
- Ardianto, Elvinaro. Q-Anees. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung (ID): Simbiosis Rekama Media.
- Arifianto, S. 2016. Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial Perspektif Dominan Kajian Ulang dan Teori Kritis. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2(2), 163-168.
- Asep, Kolopaking, Dharmawan, 2015. Dinamika peran sosial politik ulama dan jawara di Pandeglang Banten. *Jurnal Mimbar*. 31(2).
- Borbasi S. 2004. *Navigating the Maze of Nursing Research: An Interactive Learning Adventure*. Australia: Elsevier.
- Miles MB, Huberman AM. 1984, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. Jakarta (ID): Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung (ID): PT remaja Rosdakarya.
- Deswimar, D. 2014. Peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Habermas 1984. *The Theory of Communicative Action: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press
- Heyes, C. J. 2007. *Self-transformations: Foucault, ethics, and normalized bodies*. Oxford University Press.

- Hidayat S. 2007. *Too Much Too Soon. Lokal State Elites Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta (ID): Rajagrafindo
- Hudaeri 2003, Mohamad. Tasbih dan golok: studi tentang kharisma kyai & jawara di Banten. *Jurnal Istiqro*. 2(1).
- Karomani. 2017. Ulama, jawara, dan umaro: studi tentang elite lokal di Banten. *Sosiohumaniora*. 1(2).
- Kusumawarta EP, Sjaf, S. 2018. Pengorganisasian komunitas oleh inovator pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6): 731-744.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung (ID): PT remaja Rosdakarya.
- Spitzberg, B. H. 1983. Communication competence as knowledge, skill, and impression. *Communication Education*, 32: 323–329.
- Spitzberg, B. H. and Cupach, W. R. 1984. *Interpersonal communication competence*, Beverly Hills, CA: Sage.
- Yunas, N. S. 2017. Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19-27.
- Yin. 2003. *Case Study Research: Design and Methods. (3rd Edition)*. California: Thousands Oaks.
- Nasrudin, J. 2018. Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34-47.